BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah kekuasaan yang mengatur dan memaksa, hukum ini akan dibicarakan tentang hukum pidana sebagai suatu subsistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan kasus tindak pidana narkoba. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus.

Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Saat ini peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat.

Pada dasarnya narkoba sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkoba menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkoba guna kepentingan kesehatan dan ilmu

pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir dan sudah bersifat transnasional. Dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika¹ menggantikan undang-undang Nomor 22 tahun 1997. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan.² Namun, di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaanya. Undang-undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud.

Keterlibatan anak dalam dunia narkotika, tidak lepas dari peran orang tua, karena sebagaimana mestinya orang tua harus melindungi, mendidik dan memberikan kehidupan yang layak baik kebutuhan dari segi fisik maupun

¹ Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

² Pasal 45 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

psikis. Orang tua diharapkan untuk mengawasi dan mendidik anaknya agar selalu menjauhi penyalahgunaan narkoba.

Dengan memberikan pendidikan agama, maupun pendidikan umum. Generasi muda adalah tulang punggung bangsa dan Negara. Anak merupakan amanah dari Allah SWT. Yang diberikan kepada orang tua (suami-istri). Dan setiap amanah harus dijaga dan dipelihara, dalam setiap pemeliharaan mengandung unsur-unsur kewajiban dan tanggung jawab. Menjaga mereka agar tidak terpengaruh oleh bahaya narkoba adalah kewajiban semua pihak. Hasil survey membuktikan bahwa mereka yang beresiko terjerumus dalam masalah narkoba adalah anak yang lahir dari keluarga yang *broken home* atau memiliki masalah perceraian, sedangkan stress atau depresi, memiliki pribadi yang tidak stabil atau mudah terpengaruh, merasa tidak memiliki teman atau salah dalam pergaulan.

Dengan alasan tadi maka perlu pembekalan bagi orang tua mereka dapat dapat turut serta mencegah anaknya terlibat penyalahgunaan narkoba. Jadi setiap anak yang tersangkut kasus narkoba, ia berhak mendapatkan perlindungan khusus seperti halnya yang tercantum dalam undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Pasal 67 ayat 1.³

Dalam mengatasi perkara peradilan pidana anak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

³ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Pasal 2⁴. Dalam hukum islam memang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran maupun sunnah. Hanya saja menyebutkan istilah *khamar*. Tetapi dalam teori ilmu fikih, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka dapat diselesaikan melalui metode *qiyas* yang artinya mempersamakan hukum suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya. Persamaan ketentuan hukum yang dimaksud disadari oleh adanya unsur-unsur kesamaan yang sudah ada ketetapan hukumnya dengan yang belum ada ketetapan hukumnya yang disebut *illat*. Hal ini menunjukkan bahwa ada kewajiban bagi negara, orang tua, dan masyarakat untuk memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap anak tanpa adanya diskriminasi, yang ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar konvensi Hak- Hak anak yang ada pada Pasal 2⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi: a) non diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; d) penghargaan terhadap pendapat anak. Proses peradilan terhadap anak, berbeda dengan orang dewasa meskipun tahap-tahap penyelesaian peradilannya sama jika anak tersebut sampai harus menjalani proses peradilan. Tahap-tahap itu yaitu tahap penyidikan, penuntutan, dan tahap pemeriksaan oleh hakim serta putusan hakim.

⁴ Pasal 2 Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana narkoba diatur di dalam peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba anak di Pengadilan Negeri Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum pidana di Indonesia saat ini yang mengatur tentang tindak pidana narkoba sebagaimana anak adalah pelaku tindak pidana narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba oleh anak di Pengadilan Negeri Kendal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah pemahaman terhadap penulis khususnya bahaya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
 - b. Untuk menambah perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum pidana yang ada di dalam masyarakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memberikan tambahan pengetahuan terhadap orang tua dan masyarakat dalam bidang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi jawaban mengenai penerapan peradilan pidana anak.

- b. Dengan diadakanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat membandingkan antara ilmu yang diperoleh secara teori dengan ilmu yang diperoleh di lapangan sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

E. Terminologi

Penulisan ini berjudul “ Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kendal)“. Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa istilah-istilah yang digunakan maka perlu diberikan suatu penegasan. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapatkan penegasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

No	Istilah	Pengertian/Arti
1.	Penerapan	Perbuatan menerapkan, sedangkan menurut para ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun. ⁶
2.	Sanksi	Dalam hukum pidana, sanksi hukum adalah hukuman dan hukuman itu diatur di dalam pasal 10 KUHP yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Pidana Pokok <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana mati. 2. Pidana penjara. 3. Pidana kurungan. 4. Pidana denda. 5. Pidana Tutupan b. Pidana Tambahan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencabutan hak-hak tertentu. 2. Perampasan barang-barang tertentu. 3. Pengumuman putusan hakim.⁷
3.	Pelaku	Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tindak

⁶ Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Pres, Jakarta, hlm. 1598

⁷ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

		kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga. ⁸
4.	Tindak Pidana	Tindak Pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan, Undang-Undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. ⁹
5.	Narkotika	Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwasannya: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.” ¹⁰
6.	Anak	Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan pada Pasal 1 Angka 1 “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. ¹¹ Adapun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 3 menyebutkan “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana “ ¹²

⁸ Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 37

⁹ Tri Andirisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, hlm. 83

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

¹¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

¹² Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam dalam suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecah atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹³

Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju kepada identifikasi (*problem-identification*) dan akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).¹⁴

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1981, hlm 43

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 10

dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.¹⁵

3. Sumber data penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis sosiologis, dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Data primer

Yaitu sumber data yang didapat dari studi lapangan, berupa data-data dari Pengadilan negeri Kendal dan melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber terkait.

Wawancara: Monita Honeisty Boru Sitorus, S.H., M.H selaku Hakim pembimbing.

b. Data sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan. Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi:

1) Bahan hukum primer

Yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, antara lain yang terdiri dari:

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35

- a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
 - b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
 - c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
 - d) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 2) Bahan hukum sekunder
Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti tentang narkoba, sistem peradilan anak, perlindungan anak, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
 - 3) Bahan hukum tersier
Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum tersebut.

2. Studi lapangan

Dalam studi ini penulis menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Dengan metode wawancara, peneliti mengambil sampel sumber, data dengan memwawancarai orang atau lembaga yang dianggap paling tahu tentang putusan hakim dalam kasus peradilan pidana terhadap pelaku narkoba anak di Pengadilan negeri Kendal.

5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan menjadi fokus dalam penelitian adalah sesuai dalam studi kasus penelitian ini, maka penelitian ini berlokasi di Jl. Soekarno-Hatta No. 220 Kendal, Pengadilan Negeri Kendal. Adapun alasan yang dipilihnya Pengadilan negeri Kendal sebagai lokasi ini karena memang selaku penulis bertempat tinggal di daerah Kendal. Oleh karena itu lebih mudah untuk mencangkup dalam penelitian tersebut.

6. Metode Analisis data

Setelah mengumpulkan data secara lengkap baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka data-data tersebut dioalah dan dianalisis secara kualitatif. Analisisis kualitatif

adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai suatu yang utuh.

G. Sistematika Penelitian

Bab I: PENDAHULUAN:

- A. Latar belakang
- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Terminologi
- F. Metode penelitian
- G. Sistematika penelitian

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA:

- A. Pengertian tindak pidana
- B. Pengertian narkoba
- C. Pengertian tindak pidana narkoba
- D. Penanggulangan tindak pidana narkoba
- E. Pengertian dan ruang lingkup sistem pemidanaan
- F. Pengertian sistem peradilan pidana anak
- G. Pengertian diversi terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
- H. Pengaturan diversi pidana anak pelaku tindak pidana narkoba

I. Bentuk perlindungan hukum tindak pidana narkoba oleh anak

J. Tindak pidana narkoba dalam perspektif hukum Islam

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Rumusan masalah:

A. Pada Bab ini dibahas permasalahan hukum tindak pidana narkoba anak dalam peraturan perundang-undangan.

B. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkoba anak di Pengadilan Negeri Kendal.

Bab IV: Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN